

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
KEGIATAN PENGELOLAAN DAYA TARIK WISATA PROVINSI
SUB KEGIATAN PENGEMBANGAN DAYA TARIK WISATA
UNGGULAN PROVINSI
SUB SUB KEGIATAN PENGEMBANGAN DAYA TARIK WISATA
TAHUN 2021

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- a. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- c. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata;
- d. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa;
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional;
- f. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- h. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan;
- i. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah;
- j. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- k. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Ripparprov Jawa Tengah;
- l. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah;
- m. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 88 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah;

2. Gambaran Umum

Pengelolaan daya tarik wisata selama ini merupakan salah satu industri yang mampu menyediakan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam hal penyediaan lapangan kerja, pendapatan, taraf hidup, dan dalam mengaktifkan sektor produksi lain di Jawa Tengah. Usaha daya tarik wisata sangat diperlukan dalam menciptakan manfaat ekonomi, sosial dan lingkungan dari industri pariwisata, serta menjadi fokus utama dari industri pariwisata (Ismayanti, 2010).

Pengelolaan daya tarik wisata dalam pelaksanaannya sering muncul hambatan dan permasalahan seperti kompetisi yang tidak sehat antar pengelola daya tarik wisata, kerusakan lingkungan, kurang optimalnya pemanfaatan potensi kearifan lokal, dan perlunya inovasi kebutuhan wisatawan pada daya tarik wisata. Sehingga diperlukan kegiatan untuk meningkatkan pelayanan dan pengelolaan daya tarik wisata serta memberikan kemampuan kepada pengelola dan warga masyarakat sekitar daya tarik wisata dapat mengoptimalkan potensi-potensi wisata di wilayahnya secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Pembinaan Daya Tarik Wisata adalah suatu kegiatan yang bersifat membantu, membimbing, memberi masukan/ide-ide/gagasan, interpretasi wawasan, mengoreksi, meninjau dari aspek kewilayahan dan keruangan dan mengevaluasi hasil-hasil kegiatan serta indikasi pada tindakan yang aplikatif khususnya dalam pengelolaan daya tarik wisata. Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah pembinaan dengan bentuk *training of trainer* (ToT) dimana pengelola daya tarik wisata dilatih supaya mampu mengelola daya tarik wisata secara profesional dengan memanfaatkan segala potensi dan sumber dayanya, selanjutnya para tokoh dibidang daya tarik wisata tersebut dapat memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada kelompoknya sehingga terwujud daya tarik wisata yang ideal.

Kebutuhan informasi terkait daya tarik wisata dan desa wisata sangat diperlukan bagi masyarakat, terutama bagi wisatawan. Sejauh ini ketersediaan informasi dan data mengenai Daya Tarik Wisata dan Desa Wisata masih bersifat promosi, belum berisi informasi terkait gambaran lengkap destinasi pariwisata di Jawa Tengah, serta lokasi sumber data yang masih parsial. Data mengenai DTW dan Desa Wisata belum tersedia dan tersajikan dengan baik dikarenakan Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai lembaga penyedia data di Indonesia belum dapat menyediakan seluruh kebutuhan data dimaksud, terutama yang terkait dengan data sektoral. Faktor inilah yang kemudian menjadikan dasar dibutuhkan suatu kegiatan penyusunan profil desa wisata dan daya tarik wisata.

Kegiatan pengembangan daya tarik wisata merupakan kegiatan rutin yang mutlak diperlukan sebagai alat atau media untuk mengembangkan potensi daya tarik wisata dan mengukur perkembangan potensi dan posisi daya tarik wisata Jawa Tengah sekaligus memetakan persebarannya di setiap wilayah sebagai dasar

kebijakan pengambilan keputusan pimpinan sekaligus bahan perencanaan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud dari kegiatan adalah terciptanya daya tarik wisata yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta teridentifikasinya profil desa wisata dan daya tarik wisata di Jawa Tengah secara *real time* dan akurat sesuai lapangan.

2. Tujuan

Tujuan dari kegiatan ini adalah:

- a. Meningkatnya kualitas dan kapasitas daya tarik wisata di Jawa Tengah
- b. Tersedianya data dan profil desa wisata dan daya tarik wisata;
- c. Tercukupinya basis data dan informasi desa wisata dan daya tarik wisata sebagai bahan perencanaan pembangunan;

C. RUANG LINGKUP KEGIATAN

1. Pembinaan Pengelola Daya Tarik Wisata dengan pelaksanaan pembinaan dan pelatihan terhadap daya tarik wisata dengan menggunakan tiga fungsi manajemen yaitu yaitu : fungsi strategi, fungsi manajemen komponen internal dan fungsi manajemen konstituen eksternal.

- a. fungsi strategi, dimana fungsi strategi yang dilakukan oleh manajemen daya tarik wisata diantaranya penetapan tujuan dan prioritas organisasi dari pengelolaan dtw dan membuat rencana operasional untuk mencapai tujuan agar manajemen yang dilakukan pada dtw dapat terlaksana dengan baik;
- b. fungsi manajemen komponen internal, yang mana pengorganisasian dan penyusunan staff yang dilakukan oleh manajemen pengelolaan daya tarik dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan disesuaikan dengan kemampuannya masing-masing;
- c. fungsi manajemen konstituen eksternal, yang mana pada fungsi ini manajemen pengelolaan menjalin kerjasama dengan pihak ketiga yakni swasta dan Pemerintah Daerah. Selain itu untuk dapat mewujudkan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan pada daya tarik wisata materi yang disampaikan selalu memperhatikan tiga (3) indikator diantaranya lingkungan, produk wisata dan kemitraan dan partisipasi masyarakat;

2. Penyusunan Profil Daya Tarik Wisata dan Desa Wisata memiliki ruang lingkup pekerjaan berupa pendataan informasi daya tarik wisata dan dilakukan di 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dengan melibatkan instansi terkait pariwisata di Kabupaten/Kota dan Pusat serta stakeholder.

B. SASARAN

- 1. Sasaran kegiatan pengembangan daya tarik wisata adalah 12 (dua belas) daya tarik wisata di Jawa Tengah;
- 2. Sasaran kegiatan penyusunan profil daya tarik wisata dan desa wisata adalah 35 kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

C. LOKASI KEGIATAN

- 1. Lokasi utama kegiatan pengembangan daya tarik wisata berada di Karesidenan Semarang dan Karesidenan Pati;
- 2. Lokasi kegiatan penyusunan profil daya tarik wisata dan desa wisata Kota Semarang dengan supporting dari 34 Kabupaten/Kota Lainnya.

D. JADWAL KEGIATAN

Berikut Tanggal pelaksanaan Kegiatan:

NO	TAHAPAN	BULAN											
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JULI	AGUS	SEPT	OKT	NOV	DES
A.	Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Wisata												
1	Persiapan				X	X							
2	Pelaksanaan						X	X	X	X			
3	Rakor			X		X		X					
4	Evaluasi									X	X		
5	Penyusunan laporan										X		
B.	Kegiatan Penyusunan Profil Daya Tarik Wisata Dan Desa Wisata												
1	Persiapan	X	X										
2	Pelaksanaan		X									X	
3	Rakor		X									X	
4	Evaluasi			X	X							X	X
5	Penyusunan laporan												X

E. HASIL

- 1. Tersedianya daya tarik wisata potensial dengan manajemen, sumber daya manusia dan kelembagaan yang professional, serta terciptanya produk dan layanan paket wisata di daya tarik wisata yang layak jual dan berdaya saing;
- 2. Tersedianya Data dan Profil Desa Wisata di Jawa Tengah;
- 3. Tersedianya Data dan Profil Daya Tarik Wisata di Jawa Tengah.

F. KELUARAN

- 1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas manajemen pengelolaan Daya Tarik Wisata sebanyak 10 (sepuluh) DTW;
- 2. Tersedianya data profil Daya Tarik Wisata dan Desa Wisata di Jawa Tengah berupa aplikasi dan buku profil.

G. ANGGARAN

Biaya kegiatan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana Rincian Anggaran Biaya Terlampir.

H. PENUTUP

Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2021. Hal-hal lain yang belum di atur dalam pedoman ini akan diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan berlaku.

KEPALA BIDANG
PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA

PURWANTO, SH., M.Par.

Pembina

NIP. 19650510 198603 1 022